

## RINGKASAN

Tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Seiring perkembangan teknologi digital, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengembangkan platform Publikasmasda sebagai sarana pengelolaan aspirasi secara digital, yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi dari kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan, dan kunjungan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi anggota dalam penginputan aspirasi, ketimpangan jumlah aspirasi antarprovinsi, serta belum optimalnya kualitas dan kelengkapan data. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Publikasmasda belum berjalan maksimal. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa tata kelola aspirasi melalui Publikasmasda belum optimal di lingkungan DPD RI. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aspirasi tersebut berdasarkan perspektif Digital Governance serta mengidentifikasi penyebab belum optimalnya pengelolaan aspirasi secara digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan informan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan aspirasi melalui Publikasmasda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah melalui Publikasmasda belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari aspek *Digital Strategy*, *Digital Policy*, dan *Digital Standard*. Pada aspek strategi digital (*Digital Strategy*) masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya arah strategis jangka panjang dalam pengembangan sistem. Pada aspek kebijakan digital (*Digital Policy*), regulasi yang ada belum sepenuhnya selaras dan belum mampu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pada aspek standar digital (*Digital Standard*), penerapan standar operasional prosedur dan mekanisme pengendalian kualitas belum berjalan konsisten, sehingga berdampak pada belum optimalnya pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah secara digital di lingkungan DPD RI.

**Kata kunci:** Aspirasi Masyarakat, Digital Governance, Publikasmasda, Tata Kelola Digital

## SUMMARY

The governance of public and regional aspirations is an important aspect in realizing a democratic, participatory, and accountable government. Along with the development of digital technology, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) has developed the Publikasmasda platform (Public Aspirations of Society and Regions) as a medium for managing aspirations digitally. This platform is used to document, manage, and follow up on public aspirations obtained through recess activities, electoral district visits, and working visits. However, in its implementation, several problems remain, such as low participation of members in inputting aspirations, disparities in the number of aspirations across provinces, and the suboptimal quality and completeness of recorded data. These conditions indicate that the utilization of Publikasmasda has not been fully optimized. The research problem addressed in this study is why the governance of public aspirations through Publikasmasda has not been optimal within the DPD RI environment. The objective of this study is to identify and describe the governance of public and regional aspirations based on the Digital Governance perspective, as well as to determine the factors causing the suboptimal implementation of digital aspiration management.

This study employs a descriptive qualitative research method. Informants were selected using *purposive sampling*, focusing on individuals directly involved in the process of managing aspirations through Publikasmasda. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The data analysis method used is the interactive model by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested through source triangulation by comparing and rechecking the reliability of information obtained from various sources.

The results show that the governance of public and regional aspirations through Publikasmasda has not been fully optimal when viewed from the aspects of *Digital Strategy*, *Digital Policy*, and *Digital Standard*. In terms of *Digital Strategy*, there are still limitations in human resources and the absence of a clear long-term strategic direction for system development. In the *Digital Policy* aspect, existing regulations are not fully aligned and have not yet functioned as effective guidelines for decision-making. Meanwhile, in the *Digital Standard* aspect, the implementation of standard operating procedures and quality control mechanisms has not been carried out consistently, thereby affecting the overall effectiveness of digital aspiration management within the DPD RI environment.

**Keywords** : Digital Governance, Digitak Governance System, Public Aspirations, Publikasmasd